

UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI PENDIDIKAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI SABAH MALAYSIA

Desy Anastasia Christie¹
Nim. 1002045008

Abstract

Education of Indonesian Migrant Worker's children is critical issue in Sabah, therefore it become an important Indonesian Government's effort in dealing educating Indonesian Migrant Worker's children in Sabah. The effort that made by between Indonesian government is to cooperate with malaysian government and non-governmental side such as the Humana Child Aid Society Foundation. The result between the two countries is established Sekolah Kota Kinabalu (SIKK) and learning center such as Community Learning Center (CLC) and the Indonesian Government also sends educators or teachers from Indonesia that were placed in a learning center in Sabah. But there are several obstacles is the numbers of learning centers is not synergistic with the number of teachers available because the number of children in each learning center is overwhelming, not comparable to the teacher assigned to teach in the learning center.

Keywords : *Child Education, Indonesian Migrant Worker, Indonesian Efforts*

Pendahuluan

Malaysia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara industri baru karena dapat diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian negara ini mengalami peningkatan yang berdampak pada kurangnya tenaga kerja dan banyak membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja asing. Industri yang berkembang di Malaysia meliputi sektor pertambangan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor perhubungan dan pariwisata, serta sektor perdagangan dengan pendapatan perkapita mencapai USD 14.000 (www.kompasiana.com). Untuk itu tenaga kerja asing merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan industri negara tersebut, karena Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bekerja disektor atau bagian-bagian yang tidak tercukupi oleh tenaga kerja dalam negeri.

Pada tahun 1995, tenaga kerja asing yang ada meliputi 35% dari tenaga kerja di Malaysia. Tenaga kerja yang masuk ke Malaysia berasal dari berbagai negara. Adapun negara-negara asal pekerja asing yang bekerja di Malaysia ialah tenaga kerja migran dari Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Filipina, Nepal, India, Vietnam, Thailand dan lainnya (IOM International Organization of Migration, 2010:40).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: achristie.taher@gmail.com

Berdasarkan catatan pendaftaran program Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) hingga tahun 2010 tercatat 243.090 orang warga negara Indonesia (<http://www.kemlu.go.id>). Data statistik ekonomi keuangan Indonesia pada kuartal kedua menunjukkan jumlah TKI yang bekerja di Malaysia sebanyak 1,94 juta orang (Bank Indonesia dan BNP2TKI 2014). Jumlah tersebut belum termasuk TKI tanpa dokumen atau dikategorikan sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) dengan perkiraan relatif sangat banyak dan Sabah merupakan kota yang paling banyak terdapat para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia (<http://m.antaranews.com>). Dampak negatif dari tingginya tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah ikut meningkatnya jumlah anak TKI. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing, dari pihak Imigrasi Malaysia tidak membenarkan untuk para tenaga kerja membawa keluarga mereka juga untuk turut serta tinggal dan menetap (<http://www.kbrikualalumpur.org>). Meskipun terdapat larangan tersebut selama bertahun-tahun para TKI yang bermukim di ladang-ladang yang terletak di pelosok wilayah Sabah, baik sebagai pekerja legal maupun ilegal hingga menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan dan hidup dalam kondisi yang terbatas. Anak-anak dari TKI di Malaysia menimbulkan masalah baru yang berhubungan antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan masalah tentang anak TKI di Malaysia.

Hubungan Indonesia dan Malaysia mempunyai cakupan yang sangat luas, termasuk bagaimana meningkatkan kerjasama kedua negara sebagai langkah strategis yang harus dibina melalui berbagai cara. Salah satunya kerjasama untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI di Malaysia. Kerjasama dalam bidang pendidikan antara kedua negara telah berlangsung sejak tahun 1970-an, di antaranya meliputi pertukaran pelajar, beasiswa, dan pengaturan visa. Kerjasama ini menindaklanjuti nota kesepakatan kerja, yaitu perjanjian kerjasama saling pengertian di bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini terdiri dari: pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia, pertukaran pelajar, program beasiswa, pertukaran tenaga ahli, mempermudah pertukaran publikasi, program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembaga pelatihan, dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan tehnik, mengkaji pemindahan kredit atau mata kuliah antara institusi pendidikan, serta mempermudah pertukaran bahan pendidikan, penemuan bahan-bahan penelitian, alat bantu pengajaran, dokumentasi, dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium dan seminar. Kerjasama dengan Malaysia dalam bidang pendidikan akan sangat menguntungkan, terlebih mengingat amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang tinggal di dalam maupun di luar negeri.

Dalam sistem pendidikan Malaysia, Kementerian Kerajaan Malaysia mewajibkan belajar untuk warganya selama 11 tahun, yaitu untuk pendidikan rendah selama enam tahun dan pendidikan menengah selama lima tahun. Pendidikan dasar ini diwajibkan untuk semua anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Para pelajar diwajibkan mengikuti ujian negara di tahun terakhir pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Malaysia telah memberikan pelayanan pendidikan kepada semua penduduk yang tinggal di

dalam wilayah teritorial Malaysia, termasuk Sabah. Setiap penduduk di perbolehkan untuk mengikuti atau mendapatkan pelayan pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai negara tuan rumah, Malaysia lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada warganegaranya sendiri untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warganegaranya maka kapasitas sekolah yang didirikan adalah sesuai dengan jumlah warganegara Malaysia yang memerlukan pelayanan pendidikan. Sedangkan warganegara asing yang ingin memperoleh pelayanan pendidikan menunggu sampai dengan adanya ketersediaan tempat sekolah. Persyaratan umum untuk memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia antara lain warganegara Malaysia, warganegara asing yang legal, mempunyai cukup umur, dan tersedianya tempat.

Sebelum Tahun 2002, para TKI masih bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya tanpa dokumen. Tetapi setelah dikeluarkan Akta Perburuhan Tahun 2001 dan Akta Pendidikan Tahun 2001, kegiatan mereka dibatasi. Semua pekerja asing harus memiliki dokumen lengkap dan semua pelajar asing juga harus memiliki dokumen lengkap. Pemerintah Malaysia dapat menerima pelajar asing yang akan belajar di sekolah-sekolah Malaysia baik sekolah Kerajaan (Sekolah Negeri) maupun sekolah swasta sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Beberapa persoalan yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh pelajar warganegara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, antara lain dokumen pribadi anak, status keimigrasian orang tua, tempat tinggal dan ketersediaan tempat.

Kendala lain yang dialami anak TKI ialah jarak tempuh sekolah yang jauh dari kondisi ekonomi orang tua yang kurang mencukupi dan tidak memungkinkan untuk menyekolahkan anak mereka. Sikap para orang tua yang kurang menyadari arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anaknya juga sering menjadi kendala, sehingga karena tidak bersekolah banyak yang ikut bekerja bersama orang tua mereka di perkebunan-perkebunan di wilayah Sabah. Kurangnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menyebabkan akses pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia (TKI) di Malaysia masih terbatas, berdasarkan data September 2015, terdapat anak Indonesia usia 1-18 tahun sebanyak 53.687 anak, sedangkan yang baru memperoleh layanan pendidikan sebanyak 24.856 anak.

Masalah mengenai pendidikan anak TKI ini sangat penting untuk diangkat kemudian diteliti terkait dengan prioritas Pemerintah Indonesia dalam hal kemudahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Sabah yang sangat sulit mendapatkan akses pendidikan. Mengingat kembali amanat pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam konteks ini salah satu cara yang dapat dilakukan ialah memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Melalui PP No.28/1990 tentang Pendidikan Dasar, Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan tujuan memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia pada usia sekolah tujuh tahun hingga lima belas tahun, tidak terkecuali anak-anak para TKI di Malaysia (<http://www.antarakl.com>).

Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, maka penanganan masalah anak-anak TKI harus ditangani secara serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia segera turun tangan menangani permasalahan anak-anak TKI tersebut, karena menyangkut kewajiban negara yang diamanatkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara baik yang tinggal di dalam wilayah NKRI maupun di luar negeri. Masalah pendidikan anak-anak TKI di luar Indonesia, salah satunya di Malaysia tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah Malaysia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Kerjasama Internasional

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan dalam lima aspek, yaitu sebagai berikut :

- a. *Pertama*, pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. *Kedua*, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai.
- c. *Ketiga*, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. *Keempat*, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. *Kelima*, transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka. (K.J. Holsti, 1998 : 652-635)

Dalam kerjasama Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan pendidikan anak TKI di Sabah, dari kelima definisi kerjasama yang memberikan implikasi penting bagi penelitian ini adalah poin ketiga, di mana kerjasama dimaknai sebagai persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan memberikan pelayanan pendidikan anak-anak TKI yang berada di Sabah.

Dengan timbulnya permasalahan yang dialami dalam pendidikan anak-anak TKI yang berada di Sabah dianggap perlu adanya penanganan dan upaya pemerintah Indonesia dan melakukan kerjasama antara pemerintah Malaysia dan juga non-pemerintah yang juga harus mengambil peran penting dalam pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah.

Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, salah satu faktor terpenting dan mendasar, yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi dengan aktor-aktor lainnya adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri diartikan sebagai alat untuk menjelaskan, membenarkan, menawarkan dan menegur perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut H.J. Morgenthau kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa

mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.(T. May Rudy, 2002). Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara. Atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah ada duahal pokok yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*property*). Kepentingan nasional diidentifikasi dengan “tujuan nasional”, contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kepentingan mengundasi investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi. Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, adalah kepentingan ekonomi, kedua kepentingan pertahanan dan keamanan, ketiga, kepentingan internasional dan terakhir kepentingan ideologi. Keempat dimensi ini merupakan aspek-aspek utama yang memengaruhi dan memotivasi sebuah negara dalam mengusahakan kepentingan nasional negara masing-masing dalam hubungan internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari *National Interest* itu sendiri masih ambigu karena pengertiannya mengandung pro dan kontra agar bisa diterima secara umum. Meskipun demikian, tidak menjadikan *National Interest* terhambat dalam pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Karena adanya motif-motif tertentu yang mengakibatkan suatu negara harus tetap menjalankan *National Interest*-nya. Selain untuk memenuhi kepentingan nasional, eksistensi sebuah negara dalam tata pergaulan internasional juga sangat perlu adanya, sebab disamping demi menciptakan kedamaian dunia, hal ini merupakan dambaan setiap manusia di dunia. Dan yang paling utama adalah karena kepentingan nasional suatu negara dengan negara lain berbeda, maka diperlukan usaha-usaha untuk memenuhinya dalam hubungan internasional.

Thomas W. Robinson menjelaskan konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu Primary Interest, Secondary Interest, Permanent Interest, Variabel Interest, General Interest, Specific Interest.(K.J Holsti dan M. Tahir Azhary, 1998 : 212). Keenam jenis kepentingan nasional tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat masing-masing negara dan mencapai tujuan nasional. Dari jenis kepentingan di atas yang lebih dominan pada kasus pendidikan anak TKI adalah Secondary Interest karena Indonesia wajib melindungi warga negaranya yang berada di negara lain yaitu para TKI dan anak-anak para TKI tersebut yang bukan merupakan kepentingan primer bagi kepentingan nasional Indonesia tetapi memberi kontribusi pada kepentingan itu sendiri.

Metode Penelitian

Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis yang menggambarkan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak TKI di Sabah, Malaysia. Teknik Analisis data adalah teknik analisis Kualitatif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang berangkat dari hal yang umum dan memiliki kawasan yang luas menuju hal yang bersifat khusus dan spesifik, layaknya pramida terbalik, serta penelitian berdasarkan survei yang mendalam mengenai kasus tertentu, analisisnya tidak menggunakan perhitungan dalam analisa statistik. Dalam menganalisis data yang diperoleh dengan maksud

untuk memaparkan dengan jelas bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak TKI di Sabah, Malaysia.

Hasil Penelitian

Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dilihat dari kondisi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada di Sabah, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam menangani pendidikan anak-anak TKI tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dibagi kedalam dua upaya yaitu untuk menangani pendidikan anak TKI yang berada di Sabah maka perlu diadakannya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia serta NGO karena pihak pemerintah Indonesia saja tidak dapat melakukan penanganan mandiri jika negara tempat para TKI berjuang hidup tidak memberi ijin dan ikut serta dalam upaya penanganan pemberian pelayanan pendidikan. Kemudian upaya pemerintah Indonesia itu sendiri seperti pendirian sekolah Luar negeri, kelompok belajar dan juga pengiriman langsung tenaga pendidik ke Sabah.

Kerjasama Indonesia dan Malaysia serta NGO dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah

Pendidikan secara umum adalah suatu proses kehidupan dalam diri tiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkannya. Pada Bab XIII Pasal 31 UUD 1945 menyatakan: 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini yang menjadi dasar bagi Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia dengan lebih intens menyangkut pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.

Selain Akta Pengajaran Malaysia dan Undang-undang Sistem Pendidikan Indonesia, kedua negara ini juga terikat dalam Konvensi Hak Anak Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 di New York. Dalam Pasal 28 dan 29 konvensi tersebut mengatur tentang kewajiban negara dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali. Selain itu, PBB telah mencanangkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang salah satu tujuannya adalah pemeberantasan buta huruf di seluruh dunia. Diharapkan bahwa pada tahun 2015 dunia terbebas dari buta huruf. Dengan adanya dasar-dasar hukum dan kebijakan diatas, pemerintah Indonesia dan Malaysia berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berada di Sabah. Kedua negara perlu mengadakan pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan dalam menangani masalah pendidikan anak TKI di Sabah. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan ini menandakan kedua negara ikut serta dalam mencanangkan MDGs dalam bidang pendidikan, terutama komitmen internasional untuk *Education for All* (EFA). Semua komponen pemerintah, lembaga swasta, organisasi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan EFA.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada di Sabah jelas tidak terlepas dari peran penting dari negara tempat di mana anak-anak tenaga kerja Indonesia ini berada. Untuk mewujudkan pendidikan untuk semua anak-anak di dunia dan juga kepentingan Indonesia dalam pemberian pelayanan pendidikan ke seluruh anak-anak Indonesia yang berada di tanah air maupun di luar negeri, maka pemerintah Indonesia perlu adanya melakukan kerjasama bidang pendidikan dengan pemerintah Malaysia dan pihak penting lainnya.

1. Kerjasama Indonesia dan Malaysia Bidang Pendidikan

Perjanjian kerjasama saling pengertian di bidang pendidikan telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Kerjasama yang diatr dalam perjanjian ini terdiri dari:

- a. Pertukaran staf antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Malaysia,
- b. Pertukaran pelajar,
- c. Program beasiswa,
- d. Pertukaran tenaga ahli,
- e. Mempermudah pertukaran publikasi,
- f. Program pertukaran antara badan-badan perwakilan dan lembaga pelatihan,
- g. Dukungan bantuan secara timbal balik di dalam bidang kejuruan dan tehnik,
- h. Mengkaji pemindahan kredit atau nama mata kuliah antara institusi pendidikan, alat bantu pengajaran, dokumentasi dan alat peraga yang berhubungan dengan pendidikan, konferensi, simposium dan seminar,

Namun, perjanjian ini tidak mengatur pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya yang berada di Sabah. Pada pertemuan *Annual Consultation* 2004 antara Presiden Megawati dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi disepakati bahwa Indonesia akan mengirim guru-guru ke Sabah untuk membantu pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kesepakatan ini belum dapat dilaksanakan. Pada *Annual Consultation* 2006, antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, pengiriman guru dibicarakan kembali. *Consultation* ini menyepakati pengiriman guru Indonesia ke Sabah. Kesepakatan antara kedua pemimpin seterusnya ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pihak Indonesia yang terdiri dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KJRI, dan PTF Tawau, dengan pihak Malaysia yang terdiri dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Perladangan dan Komoditi, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Jabatan Pelajaran Sabah, Jabatan Imigrasi Sabah, Persatuan Perkebunan Sabah, Perusahaan-perusahaan perladangan, dan *NGO Humana Child Aid Society*. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan tersebut mencakup:

- a. *NGO Humana Child Aid Society* melaksanakan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di ladang,
- b. Indonesia mengirimkan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah Humana
- c. Indonesia membayar gaji guru dan biaya pengiriman sampai ke tempat sekolah/bimbingan belajar,
- d. untuk permulaan Indonesia akan mengirim 51 guru
- e. Syarikat Perladangan akan menyediakan tempat tinggal bagi guru-guru
- f. Pemerintah Malaysia memberikan kemudahan untuk pendidikan
- g. Kurikulum yang digunakan kurikulum kebangsaan (Malaysia).

Sampai dengan saat itu, hal tersebut menjadi pedoman bagi pihak Malaysia dalam menangani pendidikan anak-anak Indonesia di ladang. Jumlah guru yang dikirim untuk pertama kalinya sebanyak 109 dengan masa tugas selama dua tahun. Guru-guru tersebut telah menyelesaikan tugasnya dan telah kembali ke Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia telah mengirimkan sebanyak 76 guru dan sekitar 39 guru akan dikirimkan lagi. Mengingat perkembangan yang terjadi pada dewasa ini, maka Minit tersebut perlu diperbaharui dengan alasan beberapa persoalan, di antaranya:

- a. Jumlah anak Indonesia di Sabah telah bertambah menjadi 43.000,
- b. Sampai dengan saat ini (per 1 Pebruari 2010) NGO *Humana Child Aid Society* hanya dapat menampung 7.095 anak saja sehingga perlu ditambah sedikitnya lima NGO lagi agar dapat memberikan pelayanan kepada semua anak-anak Indonesia di Sabah,
- c. Agar diberikan ijin untuk mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),
- d. Harus ada pengaturan penggunaan dari donasi yang diminta oleh NGO kepada Syarikat Perladangan,
- e. Tidak ada pungutan uang kepada murid/Ibu-Bapak/orang tua murid,
- f. Syarikat diwajibkan mendirikan sekolah, bagi syarikat yang ada anak-anak Indonesia atau mengirimkannya ke sekolah Indonesia terdekat tanpa diminta bayaran, sebagai bagian dari pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*),
- g. Bobot kurikulum Indonesia agar ditambah untuk memberi kesempatan kepada anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia.

2. Peran NGO *Humana Child Aid Society*

Humana merupakan organanisasi non-profit yang banyak didirikan di negara-negara berkembang, seperti di Afrika, Asia, atau negara berkembang lainnya yang terdapat banyaknya anak terlantar yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. NGO ini mendapat dukungan dari organisasi dunia, seperti UNICEF atau organisasi sosial lainnya di dunia. Humana yang berada di Sabah, Malaysia merupakan cabang dari Humana Internasoinal. Humana Internasional atau *Humana Inc* (NYSE: HUM), didirikan pada tahun 1961 di Louisville, Kentucky, adalah Fortune 100 perusahaan yang pasar dan mengelolah asuransi kesehatan (<http://www.kompasiana.com>). Ribuan anak-anak pekerja perkebunan terutama Indonesia dan Filipina di daerah terpencil di wilayah Sabah masih tanpa akses pendidikan karena kemiskinan, jarak atau status hukum.

Tujuan *Humana Child Aid Society* adalah untuk menyediakan pendidikan dengan membuka Pusat Belajar bagi anak-anak, dan dengan demikian membantu melaksanakan dalam pemenuhan tujuan milenim PBB yakni pendidikan dasar untuk semua anak di dunia. Terwujudnya pelayanan pendidikan ini sangat bergantung pada dukungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (pihak pengelolah perkebunan) atau individu untuk dapat melanjutkan pendidikan ribuan anak-anak. Berdasarkan data dari situs *Borneo Child Aid Society*, sebenarnya Yayasan Humana sudah wujud pada tahun 1991 di wilayah Malaysia dengan jumlah 73 anak.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan bahwa anak-anak TKI legal maupun ilegal, tidak dapat bersekolah di Sekolah Kebangsaan karena sekolah-sekolah tersebut bersubsidi. Ketidakbolehan para anak TKI belajar di Sekolah Kebangsaan tidak dengan langsung menambah jumlah siswa yang belajar di Humana, karena sekolah Humana hanya dibuka di kota-kota dan belum didirikan di perkebunan. Untuk itu, maka kerjasama terjalin diantaranya ada empat pihak yang berupaya memberikan pelayanan pendidikan, yaitu KJRI Sabah, Yayasan Humana, Perusahaan perkebunan sawit dan pemerintah setempat, dalam hal ini ialah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak yang bersangkutan memiliki andilnya masing-masing dalam mewujudkan berdirinya sekolah atau *Humana House* di perkebunan-perkebunan sawit yang tersebar di wilayah Sabah. Peran perusahaan ialah mendirikan bangunan sekolah dan mengakomodasi, jika tidak ada kepedulian maka pihak KJRI menarik para pekerja dan menutup penyaluran tenaga kerja ke perusahaan tersebut, jelas para pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan sawit ini memiliki peran penting dalam kelangsungan perusahaan tersebut. Pemerintah Malaysia dengan kapasitas sebagai pemilik wilayah, dapat mengeluarkan aturan yang sifatnya memaksa perkebunan untuk menyediakan bangunan sekolah. Setelah terjadi kesepakatan, biasanya pihak perkebunan akan segera menyediakan sebuah sekolah. Baik atau buruk, lengkap atau tidaknya, fasilitas sekolah sangat tergantung kepada kemampuan kebun. Terkadang Humana juga terpaksa menarik gurunya dari sebuah perkebunan, disebabkan pihak kebun tidak mau membayar iuran untuk membayar guru.

Pembelajaran di Humana Sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Pelajaran, Kerajaan Malaysia, maka proses belajar mengajar di Humana mengikuti Huraian Sukatan Kurikulum Kerajaan Malaysia. Sekolah Humana merupakan sekolah non-formal, siswa hanya diajarkan untuk dapat membaca, menulis dan berhitung. Kurikulum pembelajaran menggunakan kurikulum Malaysia. Pendidikan yang dihasilkan oleh *NGO Humana Child Aid* ternyata tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah di Indonesia maupun Malaysia. Anak Indonesia yang belum memperoleh pelayanan pendidikan jumlahnya masih banyak. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh KJRI Kota Kinabalu pada tahun 2006 terdapat 24.199 anak dan yang memperoleh pendidikan hanya 7000 anak. Bertolak dari keadaan tersebut maka dirasakan perlunya sekolah yang dapat melayani pendidikan secara memadai sehingga perlu didirikan sekolah formal yang menggunakan kurikulum Indonesia.

Upaya Indonesia Dalam Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah

1. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK)

Pada Annual Consultation 2006, antara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya mengenai pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang tertuang dalam pernyataan bersama (*joint statement*) antara kedua pemimpin tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia melalui surat nomor: 120/DI/VI/2008/02/01 tanggal 16 Juni 2008 mengajukan permintaan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI untuk mendirikan SIKK. Untuk kelancaran pelaksanaan SIKK, maka dibentuk Panitia Pemanfaatan Subsidi Penyelenggaraan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (PENSOSBUD) di Konsulat Jenderal Republik

Indonesia Kota Kinabalu (Booklet CLC-SILN Malaysia, 2016:17). Setelah dana subsidi tersebut diterima KJRI Kota Kinabalu, persiapan-persiapan fisik untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu segera dilaksanakan. Pencarian gedung yang telah dilaksanakan sebelumnya segera diputuskan yaitu gedung yang beralamat di kompleks Alam Mesra, Jalan Sulaman. *Tenancy Agreement* ditandatangani oleh *Acting* Konsul Jenderal. Masa sewa selama dua tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2008. Gedung terdiri dari enam kedai. Selanjutnya gedung direnovasi untuk dirubah menjadi ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, perpustakaan, dan ruang serba guna yang terdiri dari enam ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang meeting, satu ruang tunggu, satu ruang perpustakaan dan satu ruang serbaguna. Selanjutnya perlengkapan sekolah seperti alat-alat pelajaran, buku-buku pelajaran, dan lain-lainnya dilengkapi.

Murid SIKK kebanyakan dari anak-anak Indonesia yang tinggal di Kota Kinabalu. Ketika dibuka untuk pertama kalinya sebanyak 576 mendaftarkan diri untuk sekolah di SIKK, sedangkan kemampuan daya tampung tidak mencukupi sehingga diadakan seleksi. Hasil seleksi sebanyak 274 murid diterima dan lainnya disalurkan kepada PKBM. Pada tahun ajaran 2009/2010, sejumlah 320 mendaftarkan dan yang diterima 72 murid, pindahan 14 murid. Jumlah murid SIKK sebanyak 352 murid. Jumlah ini naik turun karena ada murid yang keluar dan ada yang masuk. Pada tanggal 21 April 2010 SIKK telah mendapatkan tanah dengan ditandatanganinya kesepakatan jual beli antara KJRI Kota Kinabalu dengan pihak Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP). Pada tanggal 22 Desember 2013, Mendikbud M. Nuh meresmikan gedung permanen SIKK di komplek 3B No. 6 KKIP Selatan Dua Kota Kinabalu dan pada tanggal 20 Desember 2014 Mendikbud, Anies Baswedan meresmikan gedung sekolah SMA SIKK. Jumlah peserta didik SIKK (Reguler) dari tahun pelajaran 2009/2010 hingga tahun pelajaran 2016/2017 yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik dengan bertambahnya kelas jenjang pendidikan lanjutan yaitu SMP dan SMA.

2. *Community Learning Center (CLC)*

Dari data KJRI Kota Kinabalu anak-anak anggota TKI di Sabah Malaysia ini mencapai 43.000 anak usia sekolah. Untuk anak-anak TKI seusia TK dan SD dibantu ditangani oleh Humana sekitar 12.000 anak. Sedangkan anak usia tamatan SD/MI dan setara yang domisilinya tersebar di wilayah negara bagian Sabah, Malaysia mencapai kurang lebih 5000 anak (<https://edubioblog.wordpress.com>). Upaya Pemerintah Indonesia mengenai pelayanan pendidikan bagi anak TKI di Sabah terwujud dengan didirikannya SIKK, namun kehadiran SIKK tidak menutup terseleikannya masalah pendidikan anak-anak TKI yang berada di Sabah, karena SIKK sejauh ini tidak dapat menampung banyak anak TKI yang berada di Sabah dan juga SIKK hanya menerima peserta didik yang memiliki dokumen resmi keimigrasian dan kewarganegaraan lebih singkatnya disebut TKI Legal serta berdomisili di Kota Kinabalu.

Pemerintah Indonesia tidak hentinya berupaya, melalui SIKK mengupayakan adanya perluasan jangkauan pendidikan alternatif yang diperuntukan bagi anak-anak TKI legal maupun ilegal yang berada dipelosok-pelosok perkebunan dan ladang-ladang sawit yang tersebar luas di wilayah Sabah dengan membuka atau

mendirikan tempat kegiatan belajar yaitu *Community Learning Center* (CLC). Keberadaan CLC sangat penting untuk memperluas layanan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. SIKK sebagai sekolah induk yang memberikan layanan berupa dukungan pembelajaran dan pembiayaan untuk CLC yang tersebar di wilayah perkebunan dan ladang-ladang sawit di Sabah. Keberadaan CLC tentu saja salah satu hasil perundingan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada tanggal 20 Oktober 2011 dalam Joint Statement di Konsultasi Tahunan antara Presiden Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Dato ‘Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak. Kedua Pemimpin menyatakan kepuasannya pada kemajuan pertukaran di bidang pendidikan, terutama dalam program keterkaitan antara sekolah-sekolah di kedua negara termasuk melalui inisiatif Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah melalui pendirian pusat pembelajaran masyarakat (<https://www.kln.gov.my>). Pusat pembelajaran masyarakat yang dimaksudkan di dalam pertemuan tersebut adalah CLC. Kemudian di tahun selanjutnya dalam Konsultasi Tahunan diadakan, pada tanggal 18 Desember 2012 antara kedua negara dalam Joint Statement di Putrajaya. Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Malaysia untuk mendukung dan memberikan izin untuk pembentukan 22 CLC di bawah naungan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Sabah untuk anak-anak Buruh migran Indonesia di areal perkebunan. Ini termasuk pemberian izin bagi 58 guru bahasa Indonesia untuk mengajar di CLC. Kedua pemimpin mencatat kemungkinan untuk kebutuhan masa depan lebih banyak CLC di daerah perkebunan di Sabah (<https://www.kln.gov.my>). CLC hanya boleh beroperasi di wilayah perkebunan Sabah. Pemilihan lokasi CLC harus mendapat izin dari pihak perkebunan. Kemudahan transportasi, sarana dan prasarana dalam proses belajar dan mengajar merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan. Pengoperasian CLC sesuai dengan peraturan Malaysia.

Jumlah lembaga CLC SD dan CLC SMP di Sabah pada tahun 2012 dan mengalami penambahan jumlah hingga tahun 2014 dan tahun 2015. SIKK merupakan sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Di sekolah ini, para anak TKI mendapatkan kurikulum, pengajaran, evaluasi yang mengikuti sistem Indonesia. Sedangkan, CLC merupakan pusat kegiatan belajar yang dikelola oleh SIKK dan bersifat nonformal. Untuk itu CLC melalui SIKK mengadakan ujian kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

3. Pengiriman Tenaga Pengajar atau Guru ke Sabah

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) atau sekarang Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan sejak tahun 2006 telah mengirim tenaga pendidik ke Sabah, Malaysia. Pada tahun itu, Kemendiknas mengirim 51 tenaga pengajar dan pada tahun 2007 kembali mengirim 58 guru (Dhomiria.blogspot.co.id). Mereka berstatus bukan pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kontrak selama dua tahun. Pada tahun 2009, Kemendiknas kembali mengirim tenaga pengajar ke Sabah dengan jumlah lebih banyak dua kali lipat dibanding jumlah tenaga pengajar yang dikirim pada tahun

2007, yaitu 109 orang tenaga pengajar. Dikontrak selama dua tahun dan tidak ada perpanjangan kontrak.

Prosedur pengiriman tenaga pengajar berstatus PNS ini melibatkan pemerintah daerah. Manum mendapat kesulitan dimana tidak semua pemerintah daerah memberi izin pengiriman tenaga pengajar dari daerah mereka untuk dikirim dan bertugas di luar negeri karena berimplikasi pada masa kontrak habis dan pengembalian ke daerah asal tenaga-tenaga pengajar ini berakhir pulamasa tugasnya. Maka diambil kebijakan lain yaitu perekrutan calon pendidik tahun 2009 dilakukan dari lembaga di bawah Kemendiknas, seperti LPMP, PPPPTK, P2PNFI dan BPPNFI. Pada tahun 2011 kembali Kemendiknas mengirim 150 tenaga pengajar sebagai pengganti tenaga pengajar yang selesai masa tugas. Pengiriman kali ini tidak dari guru-guru yang berstatus PNS tetapi direkrut dari mereka yang baru lulus di delapan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Malang (UMI), Universitas Negeri Makasar, Universitas Negeri Tanjungpura.

Kondisi pendidikan yang dialami anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah telah dijelaskan ada tiga faktor yaitu yang pertama adanya peraturan dalam negeri Malaysia yang membatasi bahkan mempersulit keturunan warga negara asing untuk menempuh pendidikan di sekolah di bawah naungan negara Malaysia. Dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1b Akta Pengajaran Malaysia tahun 1998 yang memperbolehkan anak-anak tenaga kerja asing termasuk Indonesia dalam artian tenaga kerja yang legal untuk mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia. Yang dimaksud ialah tenaga kerja yang bekerja di badan pemerintahan Malaysia, tidak termasuk di dalamnya yaitu tenaga kerja yang beerja di sektor-sektor swasta. Namun adanya peraturan tersebut tidak menutup para tenaga kerja asing yang memiliki anak untuk tidak bersekolah, ketidakefektifan dari perturan yang ada masih menunjukkan adanya anak-anak dari tenaga kerja asing termasuk tenaga kerja Indonesia dapat bersekolah di sekolah kebangsaan Malaysia. Jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan ditiap tahun selanjutnya juga menambah jumlah anak-anak mereka untuk dapat bersekolah di sekolah kebangsaan Malaysia. Melihat kondisi yang terjadi pemerintah Malaysia kembali mengeluarkan peraturan dalam Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan Malaysia tahun 2001 yang menyatakan dengan tegas bahwa semua pekerja asing dan pelajar harus memiliki dokumen lengkap. Dan seluruh anak-anak TKI dilarang untuk bersekolah di sekolah-sekolah milik kebangsaan karena seluruh sekolah kebangsaan Malaysia merupakan sekolah bersubsidi. Hal ini memunculkan permasalahan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang ingin bersekolah, jika yang memiliki dokumen lengkap saja diberatkan untuk bersekolah, hal ini tentu menjadi semakin sulit bagi anak-anak TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap.

Indonesia dan Malaysia juga terikat dalam Konvensi Hak Anak Internasional PBB, yang mewajibkan negara memberikan pendidikan kepada anak-anak tanpa terkecuali. Selain itu PBB mencanangkan MDGs dengan tujuan pemberantasan buta huruf di seluruh dunia yang telah penulis jelaskan diawal bab. Untuk itu

pemerintah Indonesia melakukan kerjasama bidang pendidikan dengan pemerintah Malaysia untuk pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Pada pertemuan *Annual Consultation 2004* disepakati bahwa Indonesia akan mengirim guru-guru ke Sabah untuk membantu pendidikan bagi anak-anak TKI tetapi kesepakatan ini belum dapat terlaksana. Kemudian pada *Annual Consultation 2006* kesepakatan pengiriman guru kembali dibicarakan. Pada *Consultation* ini selain menyepakati pengiriman guru juga diadakan tindakan lanjutan. Pertemuan yang terdiri dari pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Perladangan dan Komoditi, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Jabatan Pelajaran Sabah, Jabatan Imigrasi Sabah, Persatuan Perkebunan Sabah, Perusahaan-perusahaan Perladangan dan NGO *Humana Child Aid Society*. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu pelayanan pendidikan yang dilakukan NGO *Humana Child Aid Society* untuk anak-anak TKI di Sabah. Upaya ini tidak sesungguhnya efektif dimana anak-anak yang bersekolah di setiap *Humana House* (*Humana House* adalah sebutan untuk kegiatan belajar Humana) yang tersedia di perladangan jumlahnya masih kalah dengan jumlah anak TKI yang ingin bersekolah lagi pula kurikulum yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar di *Humana House* sepenuhnya menggunakan kurikulum pendidikan Malaysia, *Humana House* juga merupakan sekolah informal.

Pada *Annual Consultation 2006* juga disepakati pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) tetapi proses yang dilakukan dianggap lama, karena pada tahun 2008 pengajuan permintaan kepada Menteri Pendidikan Nasional RI untuk mendirikan SIKK. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu ini merupakan sekolah formal namun tidak dapat menampung banyak anak TKI yang belum mengenyam pendidikan karena lokasi SIKK jauh dari lokasi perkebunan sawit dimana terdapat lebih banyak anak-anak TKI yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan untuk itu pemerintah Indonesia mengupayakan berdirinya pusat kegiatan belajar perkebunan sawit yg tersebar di Sabah dan SIKK sebagai sekolah induk dari pusat belajar CLC. Dalam *Joint Statement* pada konsultasi tahunan antara kedua pemimpin negara tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tanggapan baik dari pemerintah Malaysia mengenai pendirian dan beroperasinya CLC di ladang-ladang namun harus tetap sesuai dengan dasar-dasar hukum pendirian CLC yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan Malaysia. CLC juga merupakan sekolah informal, tetapi karena CLC merupakan bagian dari SIKK, untuk penyetaraan paket SIKK melalui CLC yang tersebar di ladang-ladang mengadakan ujian penyetaraan paket yaitu Paket A, B dan C.

Pemerintah Indonesia juga berupaya mengirim tenaga pendidik atau guru langsung ke Sabah. Upaya yang dilakukan bertahap dari tahun 2006 sebanyak 51 tenaga pendidik, tahun 2007 sebanyak 58 tenaga pendidik berstatus non-PNS dengan masa kontrak dua tahun. Tahun 2009 jumlah tenaga pendidik yang didatangkan ke Sabah meningkat. Tenaga pendidik dikirim untuk menempati sekolah dan pusat-pusat belajar yang tersebar di Sabah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani pendidikan anak-anak TKI di Sabah dalam pemberian pelayanan pendidikan ini merupakan upaya pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia, pencapaian kepentingan dilakukan dengan Kerjasama Internasional dengan

pemerintah Malaysia dan pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak pemerintah ataupun non-pemerintah. Pihak terkait dalam pemberian pelayanan pendidikan yaitu pihak perusahaan-perusahaan tempat banyaknya para TKI bekerja dan pengelola perkebunan sawit di Sabah. Humana House No.71 Moynod Estate-Ladang Sabah, Sandakan, Sekolah Humana Moynod Estate-Ladang Sabah ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pihak perusahaan untuk pemberian pelayanan pendidikan. Estate ini termasuk dalam tiga estate yang terdapat di IOI Group Ladang Sabah. Dua estate lainnya adalah Moynod 2 estate dan Luang Manis (*central*) estate. Sekolah humana di perusahaan ini terdapat di Moynod 1 dan Luang Manis. Kemudian salah satu contoh lagi yaitu bantuan dan peran serta Rekind dan perusahaan konstruksi NHY dalam menyediakan fasilitas belajar untuk anak-anak Indonesia di CLC Cerdas, Penampang, Kota Kinabalu (m.republika.co.id). Perusahaan menyatakan bantuan fasilitas belajar kepada CLC Cerdas merupakan wujud dari kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap pendidikan anak TKI di Sabah.

Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Menangani Pendidikan Anak TKI di Sabah.

Berbagai macam upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia dilakukan. Dalam upaya Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan pendidikan tak terlepas dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut. Hambatan tentu dengan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya demikian juga dengan bertambahnya jumlah anak-anak mereka, apalagi jika anak-anak tenaga kerja Indonesia ini tidak memiliki dokumen-dokumen resmi kewarganegaraan dan keimigrasian. Ketiadaan izin tinggal dan bersekolah yang dialami anak-anak para tenaga kerja Indonesia ini akan menjadi persoalan yang berkepanjangan dan tidak ada habisnya. Keberadaan Sekolah Indonesia kota Kinabalu (SIKK) yang menjadi Sekolah Indoonesia di Luar Negeri (SILN) dengan kekhususan karena harus menerima peserta didik dari anak-anak tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi kewarganegaraan dan keimigrasian. Padahal sangat jelas bahwa SILN didirikan untuk memenuhi tujuan pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang orang tuanya sedang dalam tugas atau bekerja di luar negeri sebagai pekerja profesional atau pejabat pemerintahan.

Perkembangan jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada di Sabah yaitu *Community Learning Center* (CLC) yang tersebar luas ini pun juga terkendala. Karena keberadaan CLC dengan jumlah peserta didik di tiap CLC sangat banyak tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak bersinergi dengan pengadaan tenaga pengajar atau guru-guru dari Indonesia yang tersedia. Pengurusan visa para tenaga pendidik atau guru-guru pun menjadi tantangan bagi koordinator pusat kegiatan belajar masyarakat atau CLC. Hambatan lainnya bersangkutan dengan perizinan pendirian beberapa CLC yang masih menjadi masalah. Terdapat sejumlah CLC non ladang yang masih belum memiliki izin pendirian pengoperasian dari pemerintah Malaysia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah. Hal ini mencakup kerjasama bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Kerjasama yang dirundingkan dalam *Annual Consultation* antara kedua negara tersebut menghasilkan kesepakatan atas pemberian izin belajar di pusat belajar karena pemerintah Malaysia mengeluarkan larangan warga negara asing belajar di Sekolah Kebangsaan karena sekolah-sekolah tersebut bersubsidi. Kerjasama juga terjalin antara NGO Humana Borneo Child Aid Society dan juga Perusahaan-perusahaan perkebunan/ladang kelapa sawit yang berada di wilayah Sabah, Malaysia.
2. Upaya pemberian pelayanan pendidikan selanjutnya ialah pemberian izin berdirinya Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Kemudian diperluas dengan diberinya izin berdiri pusat kegiatan belajar masyarakat atau Community Learning Center (CLC) yang tersebar di perkebunan-perkebunan dan ladang-ladang sawit di wilayah Sabah khusus anak-anak tenaga kerja Indonesia. Dan juga pengadaan tenaga pendidik dan pengiriman guru-guru langsung dari Indonesia untuk ditempatkan di pusat belajar CLC, Humana dan SIKK.
3. Adanya upaya tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah karena terdapat beberapa hambatan dalam memaksimalkan pemberian pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah yaitu perkembangan jumlah pusat kegiatan belajar tidak besinergi dengan jumlah tenaga pendidik atau guru-guru yang ada, jumlah siswa di tiap-tiap CLC sangat banyak tidak sebanding dengan tenaga pengajar yg ditugaskan untuk mengajar di CLC yang tersedia. Jumlah tenaga pendidik yang dikirim langsung dari Indonesia dirasa kurang cukup. Lalu hambatan lainnya ialah masih belum adanya izin pendirian dan pengoperasian CLC non ladang dari pemerintah Malaysia. Kemudian hambatan yang timbul dari orang tua anak-anak TKI ini yang kurang peduli akan kebutuhan pendidikan anak-anaknya dengan berbagai alasan.

Daftar Pustaka

Buku, E-book, Jurnal dan Skripsi

Holsti, K.J., *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, terjemahan oleh M. Tahrir Azhari, Erlangga, Jakarta 1988, hal. 652-653.

IOM International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia*, Jakarta, 2010.

Mas'ood, Mohtar. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisisasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1989.

Rudy, T. May, *Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. (Bandung: Refika Aditama, 2002).

SILN-CLC Malaysia, Booklet, *Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Indonesia Di Malaysia*, Kuala Lumpur, 2016.

Situs Internet

“*Anak Garuda di Negeri Bawah Bayu*” dalam situs http://www.kompasiana.com/nasin/anak-garuda-di-negeri-bawahbayu_551c1674a33311e22bb659fd diakses pada tanggal 31 Mei 2017

“*Buruh Migran Di Asia, Kebijakan Dan Praktek Dalam Ilmu Sosial*” oleh Jerry Indrawan dalam situs www.kompasiana.com/www.jerryinfrawan.com/Buruh-migran-di-asia-dan-praktek-dalam-ilmu-sosial-551b5b85a33311ee21b65f02 diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

“*Guru Indonesia Untuk Masa Depan Anak TKI*” dalam situs <http://m.antaranews.com/berita/258977/guru-indonesia-untuk-masa-depan-anak-tki> pada tanggal 24 Maret 2015.

“*Pelayanan Pendidikan untuk Anak-anak WNI di Sabah Malaysia*” dalam Situs <http://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/arsip/lembar-informasi/-pages/PELAYANAN-PENDIDIKAN-UNTUK-ANAK-ANAK-WNI-DI-SABAH-MALAYSIA.aspx> diakses pada tanggal 18 april 2015

“*Pernyataan Joint Antara Malaysia Dan Republik Indonesia Pada Konsultasi Tahunan*” dalam situs <https://www.kln.gov.my/archive/content.php?t=3&articleid=1754579> diakses pada tanggal 28 April 2017

“*Sejarah Berdirinya SMP Terbuka (Community Learning Center) di Sabah*” oleh Dadistrygwy <https://edubioblog.wordpress.com/2016/01/03/sejarah-berdirinya-smp-terbuka-community-learning-centre-di-sabah/> diakses pada tanggal 28 April 2017

“*Tantangan Pendidikan Anak-anak TKI di Malaysia*” oleh dalam situs <http://www.antarakl.com/ondex.php/headlines/210-tantangan-pendidikan-anak-anak-tki-di-malay> diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

“*Menjadi Tenaga Kerja di Malaysia*” dalam situs <https://www.kbrikualalumpur.org/index.php/tenaga-kerja/menjadi-tenaga-kerja-indonesia-di-malaysia> diakses pada tanggal 21 April 2015.